

PENGUJIAN SECARA SIMULTAN DAN PARSIAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL Padriyansyah ¹⁾, Muhammad Said ²⁾

¹⁾Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan

²⁾Dosen jurusan manajemen, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan

¹⁾Email : padriyansyah@univ-tridinanti.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
06/01/2021

Revised:
25/05/2021

Accepted:
27/06/2021

Online-Published:
30/06/2021

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang. Populasinya adalah laporan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal di APBD Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan sampelnya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal di pemerintahan Kota Palembang untuk perbulan selama 3 tahun (36 bulan) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan metode purposive sampling. Teknik penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian secara parsial H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. H_2 diterima artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan secara simultan H_3 diterima artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal

ABSTRACK

The objectives of this study are: 1) to determine and analyze the effect of local original income and balancing funds simultaneously on capital expenditures in the Palembang City Government, 2) to determine and analyze the effect of partial local revenue and balancing funds on capital expenditures in the City Government Palembang. The population is the report of local revenue, balancing funds and capital expenditures in the Palembang City Government APBD. While the sample is local revenue, balancing funds and capital expenditures in the Palembang City government for a month for 3 years (36 months) from 2015 to 2017 using the purposive sampling method. The research technique is carried out by using multiple regression analysis model which aims to find out and obtain an overview of how much influence the independent variable has on the dependent variable. The results of the study are partially accepted, H_1 means that local revenue has an effect on capital expenditure. H_2 is accepted, meaning that the balancing fund partially affects capital expenditures, while simultaneously H_3 is accepted, meaning that regional original income and balancing funds simultaneously affect capital expenditures.

Keywords: local revenue, balancing fund, capital expenditure

A. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya

kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009:132) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah,

retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah

mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim :2007).

Berikut ini alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Kota Palembang yaitu :

Tabel 1. APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2015– 2017
(dalam jutaan rupiah)

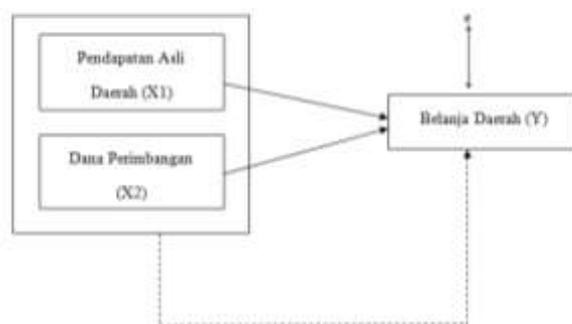
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2015	2.287.016	2.644.843	1.099.140
2016	2.084.967	3.441.412	922.247
2017	2.784.967	2.262.707	906.693

Sumber : Laporan APBD Pemerintah Kota Palembang

Data pada tabel 1. diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal cenderung menurun. Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi ideal dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih mandiri. Kondisi ini sejalan dengan Rudi Hermawan (2017) yang menyatakan bahwa kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang, 2) Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas :

- *Anggaran Pendapatan*, terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - Bagian Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti : Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Pendapatan lain-lain.
- *Anggaran Belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
- *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2007:96) : pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN

Belanja Modal

Belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Ketika masyarakat merasakan pembangunan fasilitas ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin. Menurut Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

- 1). Belanja Modal Tanah,
- 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- 4). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,
- 5). Belanja Modal Fisik dan Lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu di peroleh dari artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya serta APBD Kota Palembang 2015-2017.

Populasi, Sampel, Sampling

Menurut “Sugiyono (2018:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sedangkan sampel adalah bagian dari kumpul data penelitian yang dimiliki populasi tersebut”.

Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal di APBD

Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan sampelnya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal di pemerintahan Kota Palembang untuk perbulan selama 3 tahun (36 bulan) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan metode purposive sampling, yaitu tehnik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu.

Teknik Penelitian

Teknik penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga

analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Belanja Modal
- α = Konstanta
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Bagi Hasil
- ϵ = Variabel lain

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan secara uji F (simultan) dan uji t (parsial) :

Tabel 2. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-65.255	96.374		-.677	.502
	Pendapatan Asli Daerah	.356	.151	.290	2.362	.023
	Dana Perimbangan	.509	.123	.509	4.151	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	736787.531	2	368393.766	16.995	.000 ^b
	Residual	910405.269	42	21676.316		
	Total	1647192.800	44			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah						

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan asli daerah (X_1) terhadap Belanja modal (Y)

Hasil penelitian dibuktikan pada pengujian yang telah dilakukan secara parsial dan hasil yang diperoleh yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ($2.362 > 1,682$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$) maka H_1 diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini selaras dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Rudi Hermawan (2017), yang mengadakan penelitian pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal ($0,000 < 0,05$) dan penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Bowo Setiawan (2013), yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal ($0,013 < 0,05$). Artinya, pendapatan asli daerah yang tinggi dapat meningkatkan belanja modal yang semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

Belanja modal dapat menunjukkan sinyal bahwa pemerintah memiliki prospek yang baik dan pada sisi lain belanja modal memperkuat posisi pemerintahan untuk mencari tambahan dana dari pasar modal. Dengan demikian pendapatan asli daerah mutlak diperlukan untuk pemerintah apabila hendak mengeluarkan belanja modal. Pendapatan asli daerah menggambarkan

kemampuan pemerintah mendapatkan dana melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Sumber Pendapatan asli daerah dapat berbagai macam seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaruh Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Hal ini dibuktikan pada pengujian yang telah dilakukan secara parsial dan hasil yang diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($4.151 < 1,682$ dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 diterima. Artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rudi Hermawan (2017), dengan signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,785 > 0,05$) yang menyatakan bahwa dana aperimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) yang terlalu tinggi berdampak pada Belanja modal yang semakin kecil. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal di pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Tetapi hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bowo Setawan (2013), dimana hasil penelitiannya tentang dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal

ditolak artinya tidak berpengaruh dengan signifikan di Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil penelitian, nilai dari total keseluruhan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 sama-sama berpengaruh, dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini dibuktikan pada uji F.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F memperoleh nilai F hitung sebesar 16,995 dengan signifikansi 0,000. Dari penentuan F tabel diperoleh nilai 3,220 dengan signifikan 0,05. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($16,995 > 3,220$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_1 diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya dari Rudi Hermawan (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Dan berbanding dengan hasil penelitian dari Bowo Setiawan (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasianja modal ditolak artinya tidak berpengaruh dengan signifikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. secara parsial nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,362 > 1,682$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$) maka H_1 diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

2. secara parsial nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($4,151 < 1,682$ dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_2 diterima. Artinya dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Secara simultan nilai F hitung sebesar 16,995 dengan signifikansi 0,000. Dari penentuan F tabel diperoleh nilai 3,220 dengan signifikan 0,05. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($16,995 > 3,220$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_3 diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode tahun penelitian karena periode penelitian ini terbatas pada tahun 2015-2017 agar dapat lebih akurat di dalam menganalisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya di Sumatera Selatan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Bowo Setiawan. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal* (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Jawa tengah). Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim. 2007. *Anggaran Pendapatan Belanja*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rudi Hermawan. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal*. (Studi kasus di Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian*.
Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Pasal 10 Tentang Pembiayaan
Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah
Berisikan Kebijakan Otonomi
Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun
2009 Tentang Jenis-jenis Pajak
Daerah.